

# PEMBERITAAN MEDIA

**EDISI**  
**13 - 19 April 2020**

**LULUK'S UPDATE**

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



**Perubahan Iklim**

**Pembiayaan  
Perubahan Iklim**

# PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

- Minggu lalu Badan Kebijakan Fiskal (BKF) meluncurkan Buku Pendaanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018
- Buku ini membahas secara komprehensif perkembangan pembiayaan public untuk perubahan iklim dan hasil analisis pendanaan anggaran perubahan iklim dari tahun 2016 hingga 2018
- Hasil penandaan anggaran perubahan iklim dalam periode ini juga telah digunakan oleh Pemerintah untuk mengembangkan instrument pembiayaan inovatif dalam bentuk Sukuk Hijau (Green Sukuk)
- Buku ini terdiri dari enam bab tersebut antara lain membahas komitmen Indonesia dan kebutuhan pendanaan dalam pengendalian perubahan iklim, sumber-sumber pendanaan pengendalian perubahan iklim, analisis pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia, implikasi kebijakan dan agenda ke depan.

# PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

- ❖ Di dalam buku tersaji dinamika alokasi anggaran perubahan iklim baik secara nominal maupun porsi anggaran.
- ❖ Pada 2016, porsi anggaran untuk penanganan perubahan iklim adalah 3,5% dari nilai APBN, setara dengan Rp 72,4 triliun.
- ❖ Pada 2018, anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai Rp 109,7 triliun, sekitar 4,9% dari total anggaran pemerintah.
- ❖ Alokasi anggaran tersebut beririsan dengan agenda pemerintah lainnya seperti ketahanan pangan dan energi, penyediaan infrastruktur transportasi publik dan bendungan, serta pemukiman mandiri dan rumah susun.

# PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

- ❖ Informasi mengenai alokasi anggaran tersebut diperoleh melalui proses penandaan anggaran perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT) yang dimulai pemerintah sejak tahun 2016.
- ❖ Penandaan anggaran tidak hanya menyajikan data alokasi anggaran untuk perubahan iklim namun juga sebagai sumber informasi pelaporan pendanaan dan capaian target pemerintah dalam menekan emisi gas rumah kaca, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- ❖ Data tersebut juga telah digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dalam bentuk Sukuk Hijau (Green Sukuk).

# Analisis kebijakan ahli madya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Noor Syaifudin

- ada tiga aktor kunci terkait pendanaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, yakni Kemenkeu dan Bappenas, Kementerian/Lembaga selaku pelaksana, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku National Focal Point (NFP).
- Dalam prosesnya, untuk memperkuat transparansi, ia mengatakan Kemenkeu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan perubahan iklim tercermin dalam anggaran.

# Analisis kebijakan ahli madya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Noor Syaifudin

- Sejak 2017, Kemenkeu aktif melakukan kajian.
- Tahun 2012 BKF melakukan kajian mitigation fiscal framework.
- Tahun 2013 kajian low emission budget tagging.
- Tahun 2014 kajian green planning and budgeting.
- Kemudian Kemenkeu melakukan kajian dan kegiatan budget tagging dan Tahun 2018 mulai laporan anggaran.
- Salah satu rekomendasi dari laporan tersebut adalah penerbitan green sukuk pertama di tahun yang sama.

# Analisis kebijakan ahli madya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Noor Syaifudin

- Penandaan penganggaran perubahan iklim di level output, telah dilakukan 8 Kementerian/Lembaga dan hasil dari penandaan anggaran perubahan iklim selama ini, telah dapat digunakan sebagai bahan penguatan penganggaran berbasis kinerja, atau performance based budgeting, lalu sumber pelaporan di nasional dan internasional.



# Christophe Bahuet, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia

- ❖ Ini menunjukkan negara berkembang seperti Indonesia dapat menggunakan dan melacak pendanaan publik untuk mengatasi perubahan iklim.
- ❖ Meskipun alokasi anggaran untuk perubahan iklim cukup besar, anggaran negara hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pembiayaan dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- ❖ Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memobilisasi sumber pendanaan lain seperti melalui pembentukan National Designated Authorities (NDA) untuk mendapatkan akses dana dari Green Climate Fund (GCF), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memudahkan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan opsi penyaluran yang lebih fleksibel, serta penyesuaian kebijakan perpajakan untuk melibatkan swasta.
- ❖ Pemerintah juga memanfaatkan dana transfer daerah untuk meningkatkan partisipasi pemerintah pada level sub nasional dalam menangani perubahan iklim.

# Perubahan Iklim

Berapa Potensi Kerugian  
Akibat Perubahan Iklim  
di Indonesia?

# Potensi Kerugian Akibat Perubahan Iklim di Indonesia

- Indonesia memiliki kerentanan yang relatif tinggi atas dampak perubahan iklim dan estimasi kerugian ekonominya akan mencapai Rp132 triliun pada 2050.
- Kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia selama dua dekade terakhir yang sebelumnya di urutan 69 menjadi 50.
- Estimasi yang dilakukan USAID pada 2016 nilai kerugian ekonomi yang akan ditanggung di 2050 akibat bencana ekologis mencapai Rp132 triliun atau setara 1,4 persen dari PDB Indonesia saat itu.

# Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu

- Indonesia diproyeksikan pada 2050 mengalami kerugian ekonomi yang terjadi akibat dampak perubahan iklim mencapai 1,4 persen dari nilai PDB saat ini.
- Pemerintah menyadari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim termasuk di antaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan pencapaian kesepakatan di tingkat global

- Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi Protokol Kyoto 2004 serta Kesepakatan Paris atau Paris Agreement pada 2016.
- Komitmen Indonesia di dalam kedua kesepakatan tersebut melahirkan upaya mitigasi perubahan iklim berskala nasional, yakni Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) pada 2011 dan Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.
- Indonesia pun berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) dari tingkat business as usual (BAU) sebesar 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri, atau 41 persen jika mendapat bantuan internasional.
- Selain upaya penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

# Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso

- ❖ Di Indonesia, peningkatan konsentrasi GRK itu menimbulkan kenaikan suhu Bumi. Bahkan diprediksi kalau kita tidak melakukan sesuatu, pemanasan itu akan melebihi 1,5 derajat Celsius.
- ❖ Ternyata beberapa virus yang ada di hewan di dalam hutan ini keluar, dan ini jadi fenomena yang perlu dicermati
- ❖ Dan ancaman perubahan iklim itu juga serius secara global yang perlu mendapat perhatian bersama. Ada 3,678 bencana hidrometeorologi di Indonesia selama 2019, ada puting beliung, 137 banjir, hanya 37 kejadian yang tidak terkait dengan iklim atau satu hanya persen saja.

# **Perubahan Iklim**

**Berapa dana yang dibutuhkan  
untuk menurunkan**

**Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia  
hingga tahun 2030?**

# Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca di 2030 Indonesia Butuh Rp3.461 Triliun

- Pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit dan diestimasi mencapai Rp3.461 triliun di 2030.
- Dalam Second Biennial Update Report (BUR) 2018, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 mencapai 247,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp3,461 triliun.



# Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca di 2030 Indonesia Butuh Rp3.461 Triliun

“Di second BUR 2018, Indonesia menyampaikan 247,2 miliar dolar AS kebutuhan dana.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka pendanaan. Pendanaan perubahan iklim dapat dari berbagai sumber publik, swasta atau campuran,”

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Rabu (15/4).

# Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca di 2030 Indonesia Butuh Rp3.461 Triliun

- ❖ Contohnya penanganan pandemi COVID 19 yang, sudah memakan dua hingga tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Negara-negara maju bisa mengalokasikan 10 persen PDB mereka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial.
- ❖ Pendanaan pengendalian perubahan iklim sudah teralokasikan Rp109,7 triliun di 2018, dengan rata-rata Rp92,5 triliun per tahun dari 2016 sampai dengan 2018, atau 4,3 persen dari APBN per tahun. Sebanyak 55 persen digunakan untuk mitigasi, 34 persen untuk adaptasi dan 11 persen combenefit.

# Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso

- apabila melihat kemampuan anggaran untuk mengukur kemampuan dana publik, Kemenkeu berhasil menginisiasi secara transparan komitmen untuk terus meningkat.
- Tahun ini akan masuk budget tagging di daerah, di 12 Kementerian/Lembaga, proses ini sudah melibatkan sistem penganggaran, dan ingin memasukkannya di AKSARA.
- Saat ini BKF Kemenkeu sedang bekerja sama dengan UNDP untuk melakukan identifikasi kerangka pendanaan ke depan karena begitu nyatanya ancaman perubahan iklim, kebutuhan pendanaan akan meningkat.

# **Perubahan Iklim**

**Apa kabar NDC  
(Nationally Determined  
Contribution)  
Indonesia**

- Secara umum, NDC adalah pernyataan komitmen kontribusi negara terhadap Paris Agreement yang berdasarkan hasil Katowice. Ini perlu dilaporkan pelaksanaannya sesuai petunjuk sebab ada proses ulasan dan terdapat komite yang memantau komitmen negara
- Dalam substansi baru yang masuk NDC perubahan, harus jelas penanggung-jawabnya mulai dari koordinasi, pelaksanaan serta pengukuran hasil dan pelaporannya.
- Kepentingan nasional juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam NDC perubahan. Termasuk potensi sinergi yang tinggi dengan konvensi atau perjanjian internasional lain yang akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaannya.
- Ini sejalan dengan Paris Agreement yang dinyatakan bahwa negara pihak dapat merevisi NDC-nya setiap saat dalam rangka peningkatan ambisi

# NDC (Nationally Determined Contribution)

□ Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) menyebutkan perlunya pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan isu perubahan iklim dan lingkungan lainnya agar dapat menghindari bencana iklim di masa mendatang dan lebih tangguh saat terjadinya bencana lingkungan.

**Penasihan Senior Menteri LHK sekaligus Pembina APIKI Nur Masripati:**

- perlu membumikan NDC dengan merinci roadmap implementasinya ke rencana kerja masing-masing kementerian dan stakeholder lainnya. Karena banyak elemen yang memerlukan peran kementerian selain KLHK.
- Memasuki masa implementasi NDC 2020-2030 , Indonesia perlu memperkuat implementasi di subnasional

- Harus ada peningkatan komitmen terkait penurunan emisi dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam NDC perubahan terkait rencana pengendalian perubahan iklim, karena ini menjadi salah satu prinsip dalam update NDC atau NDC Perubahan
- Prinsip ini menunjukkan tidak boleh ada kemunduran atau backsliding dalam NDC perubahan serta mencerminkan peningkatan ambisi dengan terus mendorong adanya peningkatan komitmen penurunan emisi
- Selain itu, pertimbangan tidak boleh adanya kemunduran tersebut dikarenakan tidak ada perubahan atau peningkatan target kuantitatif dalam komponen mitigasi baik itu kejelasan maupun transparansi

# Direktur Environment Institute sekaligus Ketua APIKI Network Mahawan Karuniasa

- kemunculan NDC perubahan disebabkan adanya proses evaluasi dan adaptasi dari NDC yang terpatam, baik di Indonesia maupun negara-negara lain.
- Dalam Kesepakatan Paris, semua pihak berkumpul untuk sepakat termasuk Indonesia. Indonesia sudah menyatakan komitmennya dalam NDC yang pertama.
- Target global dunia untuk mengatasi perubahan iklim adalah berupaya agar jangan sampai suhu meningkat di atas dua derajat celcius. Untuk mencapainya, dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam meningkatkan ambisis tersebut



# Update NDC Masih Menunggu di Kementerian

- KLHK mengatakan proses updated NDC (Nationally Determined Contribution) saat ini sudah selesai disusun namun masih menunggu proses lebih lanjut di kementerian terkait sebelum disampaikan ke Sekretariat UNFCCC.

*"Jadi kalau ditanyakan apakah sudah di submit atau belum, posisinya adalah menunggu proses lebih lanjut di level Menteri dan Bapak Presiden"*

Penasihat senior Menteri LHK  
sekaligus pembina APIK Indonesian Network  
Dr Nur Masripatin

# Update NDC Masih Menunggu di Kementerian

- Saat laporan updated NDC masuk ke Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Indonesia langsung dihadapi pandemi COVID-19. Sehingga fokus negara saat ini ialah menangani COVID-19.
- Saat ini belum disubmit. Proses paralel yang sedang berlangsung untuk memasuki periode implementasi yang telah disampaikan yaitu road map NDC, kelembagaan dan perangkat kebijakan lainnya juga sedang disiapkan.

# LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN  
9.00 – 9.30 WIB**



**@madaniberkelanjutan.id**

# Madani

